

ISSN 1411-9900

Jurnal EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN

Volume 12, Nomor 1, April 2011

Penyusunan Indikator dan Pemetaan Kantong-kantong Kemiskinan

Muchamad Zaenuri

**Preferensi Masyarakat pada Komoditas Elektronik Asal Cina
Pasca Pemberlakuan CAFTA 2010**

Rakhmat Priyono

Pengukuran Risiko Penyaluran Kredit di Bank Perkreditan Rakyat

Ardito Bhinadi

Survei Indeks Kepuasan Konsumen atas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah

Agus Tri Basuki

**Perkembangan Industri di Daerah Pascakrisis Ekonomi 1998:
Deindustrialisasi dan Penyebabnya**

Abdul Aziz Ahmad

Kesenjangan Investasi Domestik dalam Evaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah

Imamudin Yuliadi

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota

Indrajati Hertanto dan Jaka Sriyana

Peranan Kenaikan Harga Gabah dalam Perekonomian Indonesia Tahun 2008

Anda Triyanto dan Didi Nuryadin

Ekonomi dan
Studi Pembangunan

Volume 12

Nomor 1

Halaman
1 - 112

Yogyakarta
April 2011

ISSN
1411-9900

Jurnal

ISSN 1411-9900

EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN

Volume 12, Nomor 1, April 2011

Pimpinan Penyunting / Editor in Chief
Endah Saptutyingsih

Penyunting Pelaksana / Executive Editor
Ahmad Ma'ruf

Sekretaris / Secretary
Hudiyanto

Dewan Penyunting / Editorial Board

Jaka Sriyana	(Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)
Ahmad Jamli	(Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)
Lukman Hakim Hasan	(Universitas Sebelas Maret Surakarta)
Raditya Sukmana	(Universitas Airlangga Surabaya)
Agus Tri Basuki	(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
Lilies Setiartiti	(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
Nano Prawoto	(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
Imamuddin Yuliadi	(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
Masyhudi Muqorobin	(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Administrasi / Administration
Samsul Bahri

Sirkulasi / Circulation
Dewi Iriani

Periode terbit
2 kali setahun pada bulan April dan Oktober

Terbit pertama kali
April 2000

Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan merupakan jurnal ilmiah yang berisikan hasil penelitian dan kajian teoritis mengenai masalah-masalah ekonomi dan studi pembangunan, khususnya di Indonesia. Diterbitkan oleh Unit Penerbit Fakultas Ekonomi (UPFE) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dewan Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan atau diproses terbit oleh media lain. Tulisan yang dikirimkan menggunakan format penulisan seperti yang tercantum pada lembar pedoman penulisan jurnal di halaman belakang. Naskah yang masuk akan dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format dan tata cara lainnya. Naskah dikirim ke alamat penyunting.

Alamat Penyunting: Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Telp. (0274) 387656 pes 184, Fax. (0274) 387646 *E-mail:* jesp@umy.ac.id *Website:* <http://jurnal.umy.ac.id>

Jurnal

ISSN 1411-9900

EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN

Volume 12, Nomor 1, April 2011

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Pengantar Penyunting	ii
Penyusunan Indikator dan Pemetaan Kantong-kantong Kemiskinan <i>Muchamad Zaenuri</i>	1-12
Preferensi Masyarakat pada Komoditas Elektronik Asal Cina Pasca Pemberlakuan CAFTA 2010 <i>Rakhmat Priyono</i>	13-26
Pengukuran Risiko Penyaluran Kredit di Bank Perkreditan Rakyat <i>Ardito Bhinadi</i>	27-37
Survei Indeks Kepuasan Konsumen atas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah <i>Agus Tri Basuki</i>	38-50
Perkembangan Industri di Daerah Pascakrisis Ekonomi 1998: Deindustrialisasi dan Penyebabnya <i>Abdul Aziz Ahmad</i>	51-64
Kesenjangan Investasi Domestik dalam Evaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah <i>Imamudin Yuliadi</i>	65-75
Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota <i>Indrajati Hertanto dan Jaka Sriyana</i>	76-89
Peranan Kenaikan Harga Gabah di Indonesia Tahun 2008 <i>Anda Triyanto dan Didi Nuryadin</i>	90-112

PENYUSUNAN INDIKATOR DAN PEMETAAN KANTONG-KANTONG KEMISKINAN

Muchamad Zaenuri

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia, Telepon: +62-274-387656
E-mail: e_zauenuri@yahoo.co.id

Abstract: The study was conducted to determine the problems of poverty in a region through the careful identification and mapping of the distribution of pockets of poverty. This research uses descriptive method, to describe comprehensively about an object is observed. The use of survey techniques and analysis of quantitative and qualitative indicators based on the selected expected to obtain the maximum results in the form of identification of the districts into the pockets of poverty. The results of this study show the following: First, the majority of districts in Jayawijaya district is still in the category of severe pockets of poverty (70.3 percent) and the category was 27 per cent, while for the category "instead of pockets of poverty" only one district, namely in Wamena which also became the capital of Jayawijaya district. Secondly, there was a sharp economic disparity among districts with the category not included districts with pockets of poverty and severe poverty category. Third, most of the districts are geographically rugged region included in the category of severe poverty pockets.

Keywords: distribution of poverty, pockets of poverty, economic disparity, the causes of poverty

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan kemiskinan di suatu daerah melalui identifikasi dan pemetaan yang cermat terhadap sebaran kantong-kantong kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, untuk menggambarkan secara menyeluruh mengenai obyek yang diteliti. Penggunaan teknik survei dan analisis yang bersifat kuantitatif dan kualitatif dengan mendasarkan pada indikator-indikator terpilih diharapkan akan diperoleh hasil yang maksimal berupa teridentifikasinya distrik-distrik yang menjadi kantong kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagai berikut: Pertama, sebagian besar distrik di kabupaten Jayawijaya masih dalam kategori kantong kemiskinan berat (70,3 persen) dan yang berkategori sedang ada 27 persen, sedangkan untuk yang berkategori "bukan kantong kemiskinan" hanya satu distrik, yaitu di Wamena yang sekaligus menjadi ibukota kabupaten Jayawijaya. Kedua, ada kesenjangan ekonomi yang cukup tajam antara distrik dengan kategori bukan kantong kemiskinan dan distrik dengan kategori kemiskinan berat. Ketiga, sebagian besar distrik yang wilayahnya secara geografis bertebing termasuk dalam kategori kantong kemiskinan berat.

Kata kunci: sebaran kemiskinan, kantong kemiskinan, kesenjangan ekonomi, penyebab kemiskinan

PENDAHULUAN

Penanggulangan permasalahan kemiskinan selalu menjadi target bagi setiap negara dalam melaksanakan kebijakan pembangunannya. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multi dimensional oleh

karena itu permasalahan kemiskinan ini harus dikelola dan diatasi dengan kebijakan yang bersifat komprehensif. Kemiskinan ditandai oleh keterbelakangan dan pengangguran yang selanjutnya meningkat menjadi pemicu ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antargolongan penduduk. Kesenjangan dan pelebaran jurang

kaya miskin tidak mungkin untuk terus dibiarkan karena akan menimbulkan berbagai persoalan sosial maupun politik di masa yang akan datang.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 2000 mendeklarasikan apa yang disebut *Millenium Development Goals* (MDGs), dimana pada deklarasi tersebut PBB mengharapkan seluruh negara yang menjadi anggotanya dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di masing-masing negara hingga mencapai 50 persen pada tahun 2015. Di negara kita tingkat kemiskinan di tahun 2006 mencapai angka 39,5 persen, lebih tinggi daripada angka kemiskinan tahun 2005 yang mencapai 35,1 persen, yang menyebabkan besaran angka program pengentasan kemiskinan terus meningkat pada anggaran tahun 2007 senilai Rp51 triliun, yang sebelumnya hanya senilai Rp42 triliun pada anggaran tahun 2006 (Priyono, 2007).

Di negara kita, program penanggulangan kemiskinan bukan merupakan barang baru. Sejak dilaksanakan pembangunan di Indonesia, jumlah penduduk miskin selama periode (1976-1996) telah mengalami penurunan secara drastis. Sebagai ilustrasi: periode (1976-1981) turun dari 54,2 juta jiwa (40,1 persen) menjadi 40,6 juta jiwa (26,9 persen); pada tahun 1990 turun lagi menjadi 27,2 juta jiwa (15,1 persen); pada tahun 1996, jumlah penduduk miskin tinggal 22,5 juta jiwa atau (11,2 persen).

Sebelum masa krisis pada tahun 1997, Indonesia menjadi salah satu model pembangunan yang diakui karena berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari BPS, dalam kurun waktu 1976-1996 jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun dari 54,2 juta jiwa atau sekitar 40 persen dari total penduduk menjadi 22,5 juta jiwa atau sekitar 11 persen. Keberhasilan menurunkan tingkat kemiskinan tersebut adalah hasil dari pembangunan yang menyeluruh yang mencakup bidang pertanian, pendidikan, kesehatan termasuk KB serta prasarana pendukungnya. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 mengakibatkan jumlah penduduk miskin melonjak kembali, tahun 1998 jumlah penduduk miskin tercatat menjadi 49,5 juta jiwa (24,23 persen) dan sedikit

menurun pada tahun 1999 menjadi 47,9 juta jiwa atau mencapai 23,4 persen dari total jumlah penduduk.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2008 yang berjumlah 34,96 juta (15,42 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta. Selama periode Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,57 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan Maret 2009, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 73,57 persen. Pada periode Maret 2008-Maret 2009, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan tercatat 2,50; dan Indeks Keparahan Kemiskinan tercatat 0,68.

Rangkaian perubahan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik di Indonesia telah membentuk kekhasan karakter kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan survei SMERU pada tahun 2004, yang digali menurut orang miskin itu sendiri, faktor-faktor penyebab kemiskinan antara lain: (1) *Ketidakberdayaan* yaitu kelompok faktor yang berada di luar kendali masyarakat miskin seperti ketersediaan lapangan kerja, tingkat harga, keamanan, peraturan pemerintah. (2) *Keterkucilan* yaitu berkaitan dengan hambatan fisik dan non fisik dalam mengakses kesempatan meningkatkan kesejahteraan seperti lokasi yang terpencil, buruknya prasarana transportasi, kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, irigasi, dan air bersih. (3) *Kekurangan materi* yaitu penyebab kemiskinan yang dominan, seperti tidak memiliki rumah, tanah, modal kerja, dan rendahnya tingkat

upah atau panen yang rendah. (4) *Kelemahan fisik* yaitu kondisi kesehatan, kemampuan bekerja, kurang makan dan gizi, masalah sanitasi. (5) *Kerentanan* yaitu mencerminkan ketidakstabilan atau guncangan yang dapat menyebabkan turunnya tingkat kesejahteraan, sebagai contoh adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pekerjaan tidak tetap, bencana alam, dan berbagai musibah lainnya. (6) *Sikap atau perilaku* yaitu yang merupakan tanggung jawab orang miskin itu sendiri (namun tidak sepenuhnya), misalnya kurangnya upaya untuk bekerja, malas, tidak bisa mengatur uang, boros, berjudi, dan mabuk.

Hingga sekarang persoalan kemiskinan menjadi isu yang tidak pernah habis, apalagi yang berkaitan dengan kesuksesan kepemimpinan sebuah pemerintah daerah, topik kemiskinan seakan tidak lekang ditelan masa. Kepemimpinan pemerintah daerah akan dinilai berhasil apabila dapat menurunkan angka kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat banyak secara merata. Kemiskinan memberikan dampak negatif ke semua sektor, meningkatkan pengangguran, kriminalitas, menjadi pemicu timbulnya bencana sosial, dan akan menghambat kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian yang mendalam yang dapat memberikan gambaran solusi yang aplikatif bagi penanganan atau pengentasannya.

Sudah banyak kebijakan dan program yang digulirkan oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan ini, namun masih banyak program dan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan malah menimbulkan beban baru di masyarakat. Kegagalan dari banyak program tersebut salah satunya disebabkan kurangnya data tentang karakteristik kemiskinan yang ada di daerah terutama mengenai identifikasi kantong-kantong kemiskinan yang ada di daerah itu, sebagian besar daerah di Indonesia masih mengalami kesulitan untuk melakukan identifikasi apakah kecamatan atau distrik yang menjadi wilayahnya termasuk kantong kemiskinan atau tidak. Data yang tersedia yang berkaitan dengan kantong kemiskinan masih sebatas pada wilayah kabupaten dan bersifat nasional, informasi yang lebih detail mengenai kantong kemiskinan berbasis kecamatan atau distrik belum tersedia.

Kabupaten Jayawijaya sebagai salah satu kabupaten di provinsi Papua masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan ini meskipun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sudah dilaksanakan di daerah ini. Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sudah banyak yang diimplementasikan tapi sebagian besar merupakan program nasional, mulai dari IDT (Inpres Desa Tertinggal) di era Orde Baru hingga sekarang ada program PNPM Mandiri di tingkat distrik. Program-program tersebut ternyata masih banyak ditemui kendala dan kendala yang dihadapi sebagian besar karena kurang tepat sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut kajian yang paling mendesak agar program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif, maka diperlukan pemetaan tentang kantong-kantong kemiskinan di berbagai distrik di kabupaten Jayawijaya. Dengan diketahuinya kantong-kantong kemiskinan tersebut diharapkan dapat disusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang *pro poor* dan tepat sasaran.

Dari latar belakang tersebut dapat dikemukakan rumusan permasalahan: Bagaimana sebaran dan peta kantong kemiskinan yang ada di kabupaten Jayawijaya berbasis distrik? Indikator apa yang dipakai untuk menentukan wilayah kantong kemiskinan? Strategi umum apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten Jayawijaya untuk mengurangi kantong kemiskinan tersebut?.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendapatkan data dan informasi yang akurat tentang kondisi warga miskin di kabupaten Jayawijaya, yang diperoleh secara langsung dari sumber utamanya, (2) Mengidentifikasi dan menentukan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menentukan secara relevan dan tepat terhadap wilayah kantong kemiskinan berat, sedang dan bukan kantong kemiskinan, (3) Mengidentifikasi kantong-kantong kemiskinan berbasis distrik di kabupaten Jayawijaya, (4) Memetakan wilayah di kabupaten Jayawijaya yang termasuk dalam kategori kantong kemiskinan berat, sedang dan bukan kantong kemiskinan berdasarkan distrik yang ada, (5) Merumuskan strategi umum untuk menanggulangi kemiskinan berdasarkan pada tingkatan kemiskinan yang ada di distrik.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, dengan metode ini diharapkan dapat dijelaskan secara komprehensif mengenai obyek dan subyek yang diteliti. Metode ini dipakai karena disesuaikan dengan tujuan penelitian berupa identifikasi suatu obyek dan melakukan pemetaan. Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini dengan menggunakan studi kasus, karena bermula dari kasus tentang kurang efektifnya suatu program penanggulangan kemiskinan di suatu daerah, dan kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu kabupaten yang menghadapi permasalahan tersebut.

Penelitian ini dilakukan di seluruh distrik yang ada di kabupaten Jayawijaya dengan menggunakan data primer maupun data sekunder. Data primer didapat langsung dari sumbernya dengan menggunakan kuesioner dan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertentu yang relevan dengan penelitian ini dengan menggunakan teknik dokumentasi. Di samping itu untuk memperoleh gambaran yang sesuai dengan kenyataan yang ada juga dilakukan observasi ke beberapa distrik sebagai sampel.

Instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data dirumuskan dari penjabaran indikator-indikator yang telah ditetapkan, setelah melalui uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan *pre test - post tes* maka dapat dipakai untuk pengumpulan data secara keseluruhan di setiap distrik. Data yang telah dikumpulkan melalui instrumen tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dipakai untuk merumuskan indikator kemiskinan yang relevan dengan cakupan penelitian sebagai dasar untuk menentukan kantong-kantong kemiskinan yang meliputi di setiap distrik yang dikaji. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai pembanding dan memperjelas data kuantitatif yang ada dengan memakai teknik verifikasi.

Penetapan Indikator Kemiskinan

Untuk melakukan identifikasi dan pemetaan kemiskinan di suatu daerah terlebih dahulu dilakukan dengan menetapkan indikator kemiskinan yang sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan pengelompokan baik secara kuantitatif maupun kualitatif sesuai dengan kelengkapan data dan permasalahan yang ada agar apa yang menjadi maksud, tujuan serta sasaran penyusunan dokumen dan validasi data penduduk miskin dapat diwujudkan. Kemiskinan di kabupaten Jayawijaya terjadi disebabkan berbagai hal, terutama adanya ketimpangan atau kesalahan dalam tatanan sistem ekonomi-sosial sehingga masyarakat tidak dapat mengakses sumber-sumber pendapatan yang tersedia sehingga tidak dapat meningkatkan taraf kesejahteraan (*man made poverty*). Kemiskinan ini dapat terjadi karena kesalahan dalam kebijakan dan strategi pembangunan serta pilihan kebijakan makro yang tidak tepat.

Kemiskinan seperti terjadi di kabupaten Jayawijaya ini terutama disebabkan rendahnya kualitas SDM dan SDA sehingga masyarakat tidak dapat berproduksi dengan optimal. Pada kondisi ini unit-unit produksi tidak dapat berfungsi secara optimal sehingga tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari aspek sosial ekonomi maupun aspek lingkungan. Kata kunci dari pola kemiskinan ini adalah ketidakberdayaan masyarakat sebagai subyek pembangunan.

Penetapan indikator kemiskinan pada bagian terdahulu sudah dijelaskan secara panjang lebar dan dari sudut pandang yang cukup bervariasi. Sesuai dengan tujuan dari kegiatan ini maka pada bagian ini akan ditetapkan beberapa indikator kemiskinan yang dianggap cukup aplikatif dan dapat diterapkan untuk mengidentifikasi kantong kemiskinan di kabupaten Jayawijaya. Indikator yang paling aplikatif adalah bagaimana mengidentifikasi kemiskinan dilihat dari unit yang terkecil di masyarakat yaitu rumah tangga.

Identifikasi rumah tangga miskin selanjutnya akan diketahui apa yang menjadi penyebab dari kemiskinan yang dialami mereka, ada banyak penyebab kemiskinan yang terjadi di

kabupaten Jayawijaya. Setelah melalui observasi di lapangan dan melakukan wawancara dengan penduduk miskin dapat diidentifikasi bahwa penyebab kemiskinan di kabupaten Jayawijaya sebagian besar dikarenakan oleh faktor ekonomi, geografis, kesehatan, dan sosial.

Karakteristik Rumah Tangga Miskin.

Hasil pendataan BPS pada tahun 2010 menunjukkan sebagian besar dari rumahtangga miskin mempunyai 4,9 anggota rumahtangga. Jumlah rata rata anggota rumahtangga ini lebih besar dibanding jumlah rata-rata anggota rumahtangga tidak miskin. Ini menunjukkan bahwa rumahtangga miskin harus menanggung beban yang lebih besar dibanding rumahtangga tidak miskin. Rumahtangga miskin di daerah perkotaan rata rata mempunyai 5,1 anggota rumahtangga, sedangkan rumahtangga miskin di daerah perdesaan rata rata mempunyai 4,8 anggota rumahtangga. Angka ini dapat diketahui bahwa beban rumahtangga miskin di daerah perkotaan dalam memenuhi kebutuhan hidup ternyata lebih besar daripada rumahtangga miskin di daerah perdesaan.

Ciri lain yang melekat pada rumahtangga miskin adalah tingkat pendidikan kepala rumahtangga yang rendah. Data yang disajikan BPS memperlihatkan bahwa 72 persen dari rumahtangga miskin di perdesaan dipimpin oleh kepala rumahtangga yang tidak tamat SD, dan 24,3 persen dipimpin oleh kepala rumahtangga yang berpendidikan SD. Kecenderungan yang sama juga dijumpai pada rumahtangga miskin di perkotaan. Sekitar 57 persen rumahtangga miskin di perkotaan dipimpin oleh kepala rumahtangga yang tidak tamat SD, dan 31,4 persen dipimpin oleh kepala rumahtangga berpendidikan SD. Ciri ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kepala rumahtangga miskin di perkotaan lebih tinggi dibanding kepala rumahtangga di perdesaan. Ciri rumah tangga miskin yang erat kaitannya dengan tingkat pendidikan dan sebaran lokasi rumahtangga adalah sumber penghasilan. Menurut data BPS, penghasilan utama dari 63 persen rumahtangga miskin bersumber dari kegiatan pertanian, 6,4 persen dari kegiatan industri, 27,7 persen dari kegiatan jasa-jasa termasuk perdagangan, bangunan dan pengangkutan, dan selebihnya

merupakan penerima pendapatan. Pada tahun 1998 dan 1999 proporsi sumber penghasilan utama tidak mengalami pergeseran.

Dengan membedakan menurut daerah dapat dicatat bahwa sebagian besar atau sekitar 75,7 persen rumah tangga miskin di perdesaan mengandalkan pada sumber penghasilan di sektor pertanian. Lebih dari 75 persen rumahtangga miskin di perkotaan memperoleh penghasilan utama dari kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian dan hanya 24,0 persen rumahtangga miskin mengandalkan pada sektor pertanian. Ini konsisten dengan corak rumahtangga perdesaan yang sebagian besar adalah rumahtangga petani. Kegiatan ekonomi perkotaan yang lebih beragam memberikan sumber penghasilan yang beragam pula bagi rumahtangga miskin di perkotaan.

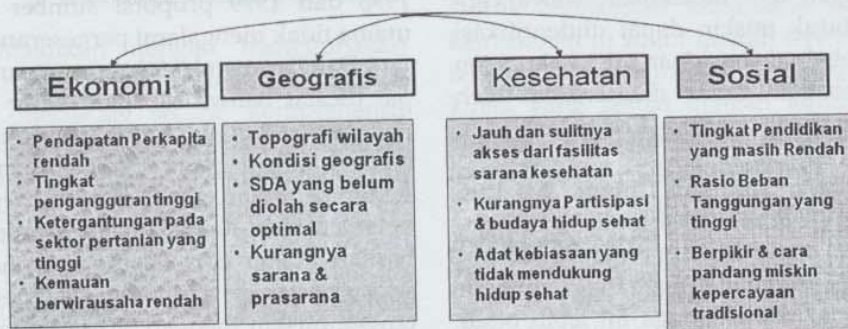
Informasi tentang profil kemiskinan di perdesaan sangat diperlukan oleh pengambil kebijakan terutama untuk penanganan masalah kemiskinan. Keterangan mengenai jenis persoalan dan akar permasalahan yang dihadapi berbagai jenis segmen penduduk miskin dapat membantu perencana program dalam menentukan program-program yang tepat. Dengan mengetahui profil kemiskinan di perdesaan, pengambil kebijakan bisa lebih memfokuskan pada program pengentasan kemiskinan di perdesaan sehingga dapat lebih sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin tersebut.

Berbagai program pengentasan kemiskinan yang didasari pemahaman menyeluruh mengenai karakteristik sosial demografi dan dimensi ekonomi penduduk miskin dapat membantu perencanaan, pelaksanaan, dan hasil target yang baik. Karena, salah satu prasyarat keberhasilan program program pembangunan sangat tergantung pada ketepatan pengidentifikasian target grup dan target area.

Penyebab dan Indikator Kemiskinan. Sesuai dengan pendekatan pengukuran dan analisis penyebab kemiskinan di kabupaten Jayawijaya dapat digambarkan pada *Gambar 1*.

Berbagai faktor penyebab kemiskinan tersebut, kemudian dapat dilakukan penetapan indikator dan parameter pengukuran kemiskinan. Penentuan indikator dan parameter ini juga mengacu pada pendekatan yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik, khususnya untuk tahun

ANALISIS PENYEBAB KEMISKINAN



Gambar 1. Bagan Berbagai Faktor Penyebab Kemiskinan

2010. Adapun indikator yang dimaksud adalah seperti pada *Tabel 1 dalam Lampiran*.

Tabel 1 menjelaskan bahwa penyebab kemiskinan di kabupaten Jayawijaya dapat dikelompokkan dalam 4 aspek/faktor utama, yaitu faktor ekonomi, geografi, kesehatan, serta faktor pendidikan/sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Utama Kemiskinan

Aspek Ekonomi. Seperti yang dijelaskan dalam kerangka konsep bahwa faktor utama penyebab kemiskinan adalah aspek ekonomi. Untuk aspek ekonomi ini akan dijabarkan dalam beberapa indikator yaitu pendapatan tetap, ketergantungan pada sektor pertanian, kegiatan wirausaha dan tingkat pengangguran. Setelah melalui pengumpulan data baik primer maupun sekunder tentang indikator yang digunakan dalam aspek ekonomi tersebut dan dilakukan skoring maka dapat disajikan pada *Tabel 2*.

Tabel 2. Hasil Penilaian Tingkat Kemiskinan Berdasar Aspek Ekonomi

No	Interval	Jumlah Distrik	Persentase (%)
1	11 - 13	28	75,7
2	14 - 16	8	21,6
3	17 - 19	1	2,7
Total		37	100

Aspek Geografi. Pengumpulan data, analisis, dan skoring yang berkaitan dengan aspek geografis lebih banyak dipakai teknik observasi, terutama untuk indikator kondisi topografi, letak geografis, dan sumberdaya alam; sedangkan untuk prasarana transportasi dengan menggunakan pengumpulan data sekunder. Setelah melalui analisis pada setiap distrik maka skoring dapat disajikan seperti pada *Tabel 3*.

Tabel 3. Hasil Penilaian Tingkat Kemiskinan Berdasar Aspek Geografi

No	Interval	Jumlah Distrik	Persentase (%)
1	9 - 11	26	70,3
2	12 - 14	10	27,0
3	15 - 17	1	2,7
Total		37	100

Aspek Kesehatan. Untuk menjelaskan aspek kesehatan dari masyarakat kabupaten Jayawijaya digunakan tiga indikator, yaitu akses kesehatan, sikap hidup dan tempat tinggal. Untuk indikator akses kesehatan berkaitan erat dengan tempat tinggal masyarakat terhadap jauh dekatnya dengan pusat kesehatan masyarakat; sedangkan sikap hidup diketahui dari penyebaran kuesioner ke berbagai kelompok masyarakat yang orbitasinya masih terjangkau dari puskesmas.

Dari hasil tabulasi data dan observasi lapangan maka skoring untuk setiap indikator tersaji pada *Tabel 4*.

Tabel 4. Hasil Penilaian Kemiskinan Berdasarkan Aspek Kesehatan

No	Interval	Jumlah Distrik	Persentase (%)
1	7 - 10	22	59,5
2	11 - 13	9	24,3
3	14 - 17	5	13,5
4	18 - 21	1	2,7
Total		37	100

Aspek Pendidikan/Sosial. Aspek pendidikan dan sosial sebagai penyebab kemiskinan di kabupaten Jayawijaya dapat dipakai indikator antara lain tingkat pendidikan, budaya dan jumlah keluarga. Setelah melalui penyebaran kuesioner dan observasi di lapangan maka dapat disajikan skoring sebagaimana *Tabel 5*.

Tabel 5. Hasil Penilaian Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Aspek Pendidikan dan sosial

No	Interval	Jumlah Distrik	Persentase (%)
1	12 - 14	23	62,2
2	15 - 17	9	24,3
3	18 - 20	5	15,5
Total		37	100

Pengukuran Tingkat Kemiskinan

Keempat aspek yang merupakan penyebab dari kemiskinan di kabupaten Jayawijaya tersebut dan dijabarkan lebih lanjut dengan beberapa indikator maka dapat disusun rekapitulasi dari skoring berdasarkan distrik yang ada. Skoring masing-masing distrik tersebut nantinya akan dibandingkan dengan ukuran yang telah ditetapkan. Skoring dari masing-masing distrik terdistribusi pada *Tabel 6 dalam Lampiran*.

Hasil penilaian dengan pendekatan skor menurut berbagai faktor penyebab kemiskinan, maka dapat diklasifikasikan masing-masing distrik menurut kedalaman tingkat kemiskinan. Klasifikasi ini terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu distrik yang masuk klasifikasi bukan kantong kemiskinan, distrik klasifikasi kantong kemiskinan sedang, dan distrik dengan klasifikasi kantong kemiskinan berat. Adapun secara rinci masing-masing distrik dapat dicermati pada *Tabel 7 dalam Lampiran*.

Dilihat dari *Tabel 7* maka dapat diketahui bahwa skor yang paling rendah adalah 39 dan yang paling tinggi mencapai 73 sehingga nilai range dari sebaran data tersebut sebesar 34, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup tinggi. Kalau dikelompokkan dalam kategori kantong kemiskinan maka akan terdistribusi seperti *Tabel 8*.

Tabel 8 . Kategori Kantong Kemiskinan

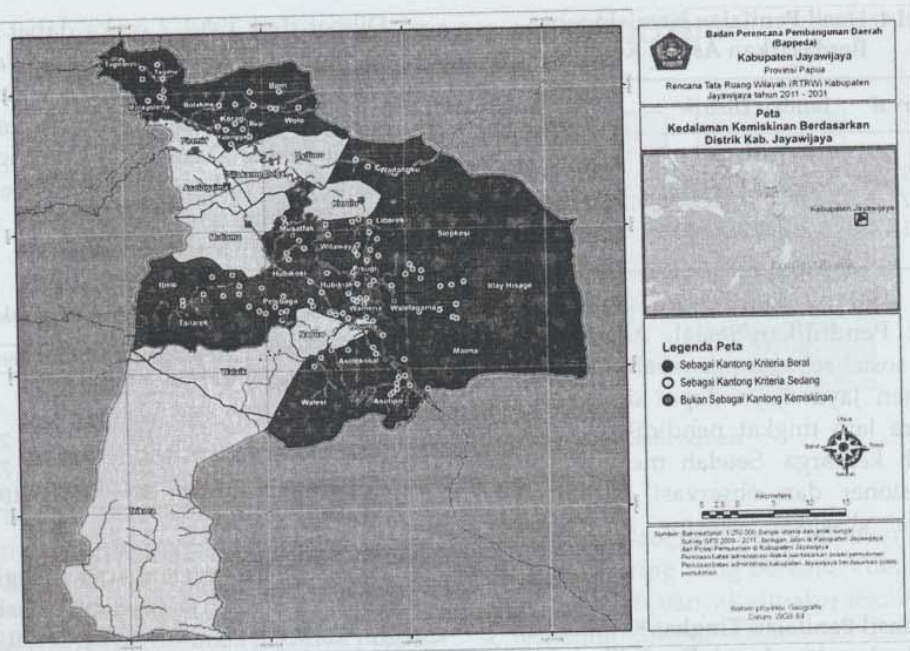
	Absolut	Persen (%)
Bukan Kantong Kemiskinan	1	2,7
Sedang Berat	10	27,0
Total	26	70,3
	37	100

Tabel 8 memberi gambaran sebagian besar distrik di kabupaten Jayawijaya masih dalam kategori kantong kemiskinan berat (70,3 persen) dan yang berkategori sedang ada 27 persen, sedangkan untuk yang berkategori "bukan kantong kemiskinan" hanya satu distrik, yaitu di Wamena yang sekaligus menjadi ibukota kabupaten Jayawijaya.

Selanjutnya untuk keperluan pemetaan dari identifikasi kantong kemiskinan yang berkategori berat ditandai dengan warna merah, kategori sedang ditandai dengan warna kuning dan kategori bukan sebagai kantong kemiskinan ditandai dengan warna hijau seperti pada peta dalam *Gambar 2*.

Pendekatan Identifikasi Kantong Kemiskinan untuk Menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Atas dasar hasil pemetaan kantong kemiskinan menurut distrik di kabupaten Jayawijaya maka di masa mendatang dapat dibuat strategi penanggulangan kemiskinan secara cermat. Dalam program pengentasan nasib orang miskin, keberhasilannya tergantung pada langkah awal dari formulasi kebijakan, yaitu mengidentifikasi siapa sebenarnya "si miskin" tersebut dan di mana si miskin itu berada. Kedua pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan melihat peta dan kantong-kantong kemiskinan di setiap distrik.



Gambar 2 . Peta Kedalaman Kemiskinan Berdasarkan Distrik Kabupaten Jayawijaya

Proses perkembangan ekonomi perdesaan di kabupaten Jayawijaya tidak terlepas dari pengaruh pendekatan tersebut, meskipun demikian terdapat elemen-elemen dasar yang menjadi penentu ekonomi perdesaan dan sumberdaya alam sebagai *primer-movernya* dan menjadi pola dasar kehidupan masyarakat perdesaan. Dengan melihat dari angka rentang yang cukup tinggi maka dapat diindikasikan bahwa di Kabupaten Jayawijaya juga terjadi kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat, yang pada dasarnya diakibatkan oleh faktor (1) sosial-ekonomi rumah-tangga atau masyarakat, (2) struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah-tangga atau masyarakat, (3) potensi regional (sumberdaya alam dan lingkungan serta infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan (4) kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global.

Salah satu *isu* yang dihadapi dalam pembangunan perdesaan adalah penurunan kualitas hidup, ketersediaan sarana dan prasarana, ketidakmampuan institusi ekonomi menyedia-

kan kesempatan usaha, lapangan kerja, serta pendapatan yang memadai, yang saling berkaitan dan sangat kompleks. Dengan demikian untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, perlunya peningkatan produktivitas yang sesuai dengan karakteristik perdesaan. Sedangkan pertumbuhan dan perkembangan wilayah perdesaan berkaitan dengan bidang usaha pertanian yang mendominasi perdesaan. Dalam dua dekade terakhir ini terdapat perubahan struktur lapangan usaha di bidang pertanian, sehingga terjadi kecenderungan penurunan di sektor pertanian, terutama dari segi lapangan usaha penduduk dan ketenagakerjaan. Kondisi ini akan membawa perubahan struktur di bidang sosial-ekonomi dan kelembagaan masyarakat perdesaan. Hambatan dalam pengembangan ekonomi perdesaan tidak saja dihadapkan pada pergeseran dari pertanian ke non pertanian yang menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat perdesaan, tetapi juga modernisasi pola usaha tani secara terpadu serta pengembangan institusi ekonomi perdesaan yang belum sepenuhnya dibangun secara konsisten. Persoalan institusi ekonomi perdesaan bukan menjadi faktor satu-satunya, faktor

modal juga menjadi kendala dalam mendukung pengembangan investasi perdesaan. Masalah pokok yang dihadapi dalam pembangunan perdesaan adalah proses kemiskinan masyarakat perdesaan sebagai akibat kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung.

SIMPULAN

Masih tingginya kemiskinan di kabupaten Jayawijaya pada dasarnya merupakan persoalan yang hingga saat ini belum teratasi dan akan terus memerlukan penanganan yang komprehensif. Untuk menanggulangi kemiskinan yang bersifat komprehensif tersebut diperlukan pemetaan distrik yang termasuk kawasan kantong-kantong kemiskinan. Setelah dilakukan penelitian dengan mengaplikasikan beberapa indikator yang layak dipakai di kabupaten Jayawijaya maka dapat diambil simpulan sebagai berikut (1) Sebagian besar distrik di kabupaten Jayawijaya masih dalam kategori kantong kemiskinan berat (70,3 persen) dan yang berkategori sedang ada 27 persen, sedangkan untuk yang berkategori "bukan kantong kemiskinan" hanya satu distrik, yaitu di Wamena yang sekaligus menjadi ibu kota kabupaten Jayawijaya. (2) Terjadi kesenjangan yang cukup tajam antara distrik yang berkategori bukan kantong kemiskinan dan distrik yang berkategori kemiskinan berat. (3) Distrik-distrik yang secara geografis sebagian besar wilayahnya bertebing masuk dalam kategori kantong kemiskinan berat.

Rekomendasi Strategis. Penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi besar yang berifat *holistik* dengan program yang saling mendukung satu dengan lainnya sehingga upaya pemahaman terhadap penyebab kemiskinan perlu dilakukan dengan baik. Sebagai dasar utama untuk menyusun strategi besar penanggulangan kemiskinan di kabupaten Jayawijaya hasil pemetaan kantong-kantong kemiskinan akan sangat bermanfaat.

Setelah diketahui dan diidentifikasi tentang kantong-kantong kemiskinan berdasarkan distrik di kabupaten Jayawijaya maka dapat dirumuskan rekomendasi yang berkaitan dengan strategi pemerintah daerah untuk mengurangi

kantong-kantong kemiskinan. Rekomendasi umum yang dapat diberikan dalam bidang perencanaan terutama perlunya *Master Plan* penanggulangan kemiskinan yang komprehensif yang disusun dengan melibatkan sebanyak mungkin *stakeholders*, berkaitan dengan rumusan strategi yang harus diambil oleh pemerintah kabupaten Jayawijaya antara lain dengan (1) membuka akses ke seluruh distrik, (2) meningkatkan dayabeli masyarakat, (3) menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, (4) mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin, (5) meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan, (6) memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, (7) meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar, (8) membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, (9) upaya mengatasi kekurangan gizi parah, (10) program peningkatan sarana dan prasarana wilayah, dan (11) peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Haris, Abdul. 2007. Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan di Daerah Hutan Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Afikasi Manajemen*. Vol. 5 No. 1, April. Probolinggo: UPM.
- Lastario, Arie. 1989. *Analisis Perbandingan Peningkatan Pendapatan dan Pemerataan, Yayasan Pengembangan Keterampilan dan Mutu Kehidupan*. Jakarta: Nusantara.
- BKKBN. 2009. *Profil Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2009*. Jakarta: BKKBN.
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Berita Resmi Statistik No. 43/07/Th. XII, 1 Juli 2009*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Distrik dalam Angka*. Kabupaten Jayawijaya: BPS.
- Nugroho, Gunarso Dwi. 2006. *Modul Globalisasi*. Banyumas: CV. Cahaya Pustaka.
- M. Nuh, Nasir, Saicrudin, dan Maulizar. 2008. Analisis Faktor-faktor Kemiskinan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Eksekutif*. Vol. 5 No.

- 4., Agustus, 2008. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Mulyo, Sumedi Andono. 2005. *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Komite Penanggulangan Kemiskinan.
- Sajogyo. 1982. *Bunga Rampai Perekonomian Desa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sholeh, Maimun. 2010. *Kemiskinan dan Beberapa Strategi Penanggulangannya*. Yogyakarta: FISE UNY.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

LAMPIRAN

Tabel 1. Ukuran Indikator Kemiskinan

Aspek Penyebab Kemiskinan	Indikator kemiskinan Masyarakat	Parameter	Skor Maks (N)	Bobot (B)	Score Maks (NxB)
1. Aspek Ekonomi (30 persen)	1) Pendapatan tetap	Rata-rata penghasilan masyarakat minimal Rp259.128.	10	1	10
	2) Ketergantungan pada sektor pertanian	Sumber pendapatan tidak tergantung dari sektor pertanian	7,5	1	7,5
	3) Kegiatan wirausaha /industri	Ada kegiatan wirausaha /industri	7,5	1	7,5
	4) Pengangguran	Masyarakat memiliki penghasilan tetap	5	1	5
2. Aspek Geografis (20 persen)	1) Kondisi topografi	Mendukung kegiatan ekonomi	5	1	5
	2) Kondisi geografis	Mendukung kegiatan ekonomi	5	1	5
	3) Ada sumber daya alam yang sudah terolah	Ada dan sudah terolah	5	1	5
	4) Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi	Ada dan lancar	5	1	5
3. Kesehatan (25 persen)	1) Akses Kesehatan	a. Tidak ada akses ke sarana kesehatan	10	0,6	6
		b. Tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan		0,4	4
	2) Sikap hidup	a. Budaya hidup tidak sehat	7	0,2	3
		b. Adat yang tidak mendukung		0,3	4
	3) Tempat Tinggal	a. Rumah tidak kokoh/permanen.	8	0,2	2
		b. Tidak memiliki MCK sendiri.		0,2	2
		c. Tidak menggunakan fasilitas energi.		0,2	2
		d. Kesulitan air bersih.		0,2	2
4. Sosial dan Pendidikan (25 persen)	1) Pendidikan	a. Tidak tamat sekolah dasar 6 tahun.	15	0,5	9
		b. Tidak mampu membiayai anggota keluarga pendidikan 9 tahun		0,3	3
		c. Akses ke Sekolah Menengah Atas		0,3	3
	2) Budaya	d. Sikap mental dan perilaku positif	5	1	5
	3) Jumlah Keluarga.	e. Tanggungan keluarga lebih besar sama dengan 4 orang.	5	1	5
Jumlah			100		100

Keterangan : Batasan masyarakat suatu distrik masuk kriteria miskin apabila memperoleh skor < 71

Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Penilaian Tingkat Kemiskinan

No	Nama Distrik	Skor Total Masing-Masing Aspek Penyebab Kemiskinan				Skor Total
		Ekonomi	Geografi	Kesehatan	Pendidikan dan Sosial	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Wamena	17	17	19	20	73
2	Trikora	13	10	17	20	60
3	Napua	15	13	16	19	58
4	Walaik	13	12	16	20	61
5	Wouma	13	12	16	20	61
6	Asologaima	15	11	15	16	57
7	Silokarno Doga	13	11	13	16	53
8	Pyramid	13	13	12	16	54
9	Muliama	11	11	12	16	50
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Kurulu	13	12	11	15	51
11	Usilimo	13	11	11	15	50
12	Wita Waya	13	10	11	15	49
13	Libarek	13	10	11	15	49
14	Wadangku	13	10	11	15	49
15	Pisugi	13	11	11	14	49
16	Musatfak	14	12	10	13	49
17	Asolokobal	14	13	8	14	49
18	Welesi	13	12	8	13	46
19	Asotipo	13	12	7	13	45
20	Maima	13	10	7	13	48
21	Walelagama	14	11	9	13	47
22	Itlay Hisage	11	9	8	12	40
23	Siepkosi	11	11	8	12	42
24	Hubikosi	14	12	8	14	48
25	Hubikiak	11	10	8	14	42
26	Pelebaga	13	9	8	12	42
27	Ibele	11	9	8	12	40
28	Tailarek	11	9	7	12	39
29	Bolakme	14	9	9	12	44
30	Tagime	11	9	7	12	39
31	Molagalome	11	9	7	12	39
32	Tagineri	11	9	7	12	39
33	Yalengga	14	9	7	12	42
34	Koragi	11	9	7	12	39
35	Wollo	11	10	7	12	40
36	Bugi	11	9	7	12	39
37	Bpiri	11	9	7	12	39

Tabel 7. Kriteria Kedalaman Kemiskinan Berdasarkan Distrik

No	Nama Distrik	Skor total	Kriteria Sebagai Kantong Kemiskinan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Wamena	73	Bukan Kantong kemiskinan
2	Trikora	60	Sedang
3	Napua	58	Sedang
4	Walaik	61	Sedang
5	Wouma	61	Sedang
6	Asologaima	57	Sedang
7	Silokarno Doga	53	Sedang
8	Pyramid	54	Sedang
9	Muliama	50	Sedang
10	Kurulu	51	Sedang
11	Usilimo	50	Sedang
12	Wita Waya	49	Berat
13	Libarek	49	Berat
14	Wadangku	49	Berat
15	Pisugi	49	Berat
16	Musاتفak	49	Berat
17	Asolokobal	49	Berat
18	Welesi	46	Berat
19	Asotipo	45	Berat
20	Maima	48	Berat
21	Walelagama	47	Berat
22	Itlay Hisage	40	Berat
23	Siepkosi	42	Berat
24	Hubikosi	48	Berat
25	Hubikiak	42	Berat
26	Pelebaga	42	Berat
27	Ibele	40	Berat
(1)	(2)	(3)	(4)
28	Tailarek	39	Berat
29	Bolakme	44	Berat
30	Tagime	39	Berat
31	Molagalome	39	Berat
32	Tagineri	39	Berat
33	Yalengga	42	Berat
34	Koragi	39	Berat
35	Wollori	40	Berat
36	Bugi	39	Berat
37	Bpiri	39	Berat

Kriteria: Skor >70: Bukan sebagai kantong miskin, Skor 51-70: Sebagai Kantong kemiskinan sedang, Skor < 50 : Sebagai kantong kemiskinan berat